PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. P. Diponegoro No. 141 Telp. (0283) – 671031 – 671032 Fax. 672323
Brebes - 52212

KEPUTUSAN SEKRETAS DAERAH KABUPATEN BREBES
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN BREBES

NOMOR 480/2676 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. Bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2 2008 tentang Keterbukaan In tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimanan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakaan pelayanan informasi kepada masyarakat.

KEDUA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 16 - 9 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SETDA

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

Pada hari ini Kamis 16 September 2021, Tim Uji Konsekuensi telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebagai berikut :

HASIL UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO.	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP
1	SEKRETARIAT DPRD	Catatan-catatan, Notulen, Risalah Rapat yang dinyatakan tertutup	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J, Pasal 68 Peraturan Tata Tertib DPRD.	Sampai dengan Catatan-catatan, Notulen, Risalah Rapat yang dinyatakan tertutup dan tidak bisa dibuka ~ bulan.	Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Sifat tertutupnya rapat.
		Keputusan Alat-alat Kelengkapan DPRD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup.	UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 370; PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 69; UU No.17 UU Noomor 14 Tahun 2008 huruf I dan J.	Sampai dengan ditetapkannya Keputusan Alat-alat Kelengkapan DPRD dinyatakan tertutup dan tidak bisa dibuka ~ bulan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Alat Kelengkapan DPRD.	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan /atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan tidak boleh diungkap.
		Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Pesermian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf	Terbatas, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota selama 6 bulan.	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan.	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terlambat,
2	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB BREBES	Data identitas korban tanah longsor	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J tentang KIP	Sampai relokasi jadi dan dapat di tempati membutuhkan waktu 1 tahun	Mengungkapkan rahasia korban	Melindungi hak pribadi korban

3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Proses uji laboratorium tentang kamanan pangan segar	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b PP nomor 38 th 2007 tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten	sampai dengan di tetapkan hasil uji laboratorium (14 hari)	Persaingan usaha keresahan Masyarakat	Melindungi dat produsen, Melindungi ketentraman Masyarakat
		Dokumen sistem mutu (doksistu) otoritas kompeten keamanan pangan Daerah (OKKPD)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b PP nomor 38 th 2007 tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten	Tidak terbatas	Dapat di salah gunakan pihak tertentu,Persaingan usaha,Keresahan Masyarakat.	Melindungi kompetensi Kelembagaan sertifikasi.
4	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BREBES	Proses penyeleksian siswa paskibra berdasarkan surat Edaran 1.KEMENPORA 2.DIPORAPAR PROF JATENG	1.PANCASILA 2.UUD 1945 (Tentang sistem pendidikan Nasional) 3.INPRES NO 14 Tahun 1981(tentang Urutan Upacara Bendera) 4. Permenpora no 65 Tahun 2015	Proses Penyeleksian 3 hari, Proses Karantina 15 hari sampai dengan pelaksanaan pengibaran sang Merah Putih	Hasil pemilihan kurang fair	terpilihnya calon paskibra sesuai ketentuan dan kriteria yg tetapkan
5	DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES	Data anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) baik itu pelaku maupun Korban	UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Anak	Tidak ada batas waktu	Dapat menimbulkan bullying terhadap anak	Menjaga identitas dab prinsip anak yang bersangkutan
		Data Eks NAPZA Dan korban yang sedang menjalani rehabilitasi	UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Tidak ada batas waktu	dapat menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat dan memunculkan stigma negatif di masyarakat	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban selanjutanya dapat hidup normal sediakala
		Data PSK yang terjaring oleg satpol PP	UU No 40 Tahun 2004 Tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Tidak ada batas waktu	Dapat menimbulkan trauma/stikma dari masyarakat bagi pelaku	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban selanjutanya dapat hidup normal sediakala
		Data ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS	UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi ODHA	Tidak ada batas waktu	Dapat menimbulkan trauma/stikma dari masyarakat bagi pelaku	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban selanjutanya dapat hidup normal sediakala

6	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA	Usulan Penetapan penyesuaian Upah Minimum kabupaten dari Bupati kepada Gubernur	1. UU No 11 Tahun 2020 2. PP No 36 Tahun 2021	Sampai Upah Minimum di tetapkan Gubernur (3 Bulan) * Upah minimum Provinsi di tetapkan tanggal 21 November setiap tahunnya *Upah minimum Kabupaten di tetapkan tanggal 31 November setiap tahunnya *Pemberlakuan UMK Tahun 2022 per 1 Januari 2022	Mengganggu proses penetapan usulan Upah Minimum Kabupaten Dewan Pengupah Kabupaten Brebes	Meminimalis penyebaran Usulan Upah Minimum Kabupaten yang belum di tetapkan oleh Gubernur
7	DINAS LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH	Hasil uji Laboratorium Lingkungan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf l Permen LH Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan Hidup	Laporan hasil uji Laboratorium hanya akan di berikan kepada pelanggan yang bersangkutan. Laboratorium tidak akan memberikan hasil uji kepada pihak lain selama tidak ada permintaan khusus oleh pelanggan / penyelidikan secara Hukum	Penyalahgunaan oleh Pihak lain	Melindungi dan mangamankan Pelanggan

BERITA ACARA

NOMOR 480 / 1772 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Senin, tanggal 16 September 2021 telah melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Asri Noah M.	
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Siti Aminah.	
3.	DINAS SOSIAL	WARNOIN	
4.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Karyoni	
5.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	B. S- Utami	
7.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Tugeng	
8.	SEKRETARIAT DPRD	Oki Haker	
9.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Akhmad Rofi	
10.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Ulfatun laeli S	

Mengetahui :
PPID UTAMA KABUPATEN BREBES

LUSIANA INDIRA ISNI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19650903 198903 1 010